

REKAYASA KEBENCIAN DALAM KONFLIK AGAMA: KASUS TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA

Abstrak

Studi ini menganalisis kasus perusakan dan pembakaran belasan tempat ibadah warga Tionghoa di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 29-30 Juli 2016. Peristiwa itu dipicu oleh ketersinggungan karena pernyataan Meliana, seorang warga Tionghoa yang dianggap menghina simbol agama. Kasus tersebut kini bergulir menjadi kasus penodaan setelah para tersangka perusakan mendapatkan vonis hukuman. Kini Meliana, yang menjadi korban sasaran perusakan, masih harus menghadapi ancaman lain setelah pada Maret 2017 lalu dia ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama.

Sejauh ini, laporan-laporan yang ada umumnya menggambarkan peristiwa di atas sebagai konflik etno-religius yang dipicu pernyataan Meliana. Menggunakan data hasil wawancara serta analisis dokumen pengadilan dan laporan pemantauan, studi ini menelusuri proses eskalasi konflik dan menemukan adanya rekayasa kebencian dan ketersinggungan yang selama ini sering luput dari perhatian. Studi ini kemudian berargumen bahwa rekayasa tersebut efektif karena ditunjang oleh jalinan berbagai faktor seperti riwayat konflik sebelumnya di wilayah itu, kecemasan ekonomi, pola interaksi sosial, selain dan terutama tindakan aktor-aktor negara.

REKAYASA KEBENCIAN DALAM KONFLIK AGAMA: KASUS TANJUNG BALAI, SUMATERA UTARA

Siswo Mulyartono • M. Irsyad Rafsadie • Ali Nursahid¹

I. PENDAHULUAN

Kekerasan etnis dan agama berskala besar yang terjadi pada awal transisi demokrasi kini sudah menurun. Tapi kasus-kasus intoleransi dan kekerasan bernuansa agama berskala kecil masih terus terjadi. Kasus-kasus tersebut kini disertai naiknya dua fenomena yang makin mengkhawatirkan: politisasi sentimen anti-Tionghoa dan politisasi isu penodaan agama.

Politisasi sentimen anti-Tionghoa sudah berlangsung sejak lama, namun hal itu terasa menguat beberapa tahun terakhir ini. Kekerasan anti-Tionghoa mencuat di ujung Orde-Baru (Purdey 2006). Namun Panggabean dan Smith (2011) menemukan bahwa kekerasan tersebut terkonsentrasi secara geografis dan bukan semata-mata disebabkan oleh pemilahan etnis, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh peran dan strategi aktor negara.

Dalam konteks politik elektoral, sentimen etnis dan agama juga digunakan untuk memobilisasi dukungan seperti nampak dalam pemilihan walikota Medan 2010 (Aspinall dkk. 2011) dan pemilihan gubernur Jakarta 2012 (Hosen 2016). Sebagian analisis terhadap hasil beberapa pemilu tersebut menilai bahwa faktor ras dan agama makin kehilangan

¹ Kami berterimakasih kepada Ayu Mellisa yang turut membantu mengumpulkan bahan-bahan awal mengenai kasus ini. Kami juga berterimakasih kepada para narasumber yang menanggapi naskah awal laporan ini, dalam diskusi tentang laporan ini di kantor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, pada 24 Mei 2017: Tobias Basuki (peneliti CSIS), Sana Jaffrey (kandidat doktor, Chicago University), Ihsan Ali-Fauzi (Direktur PUSAD Paramadina), dan Zainal Abidin Bagir (CRCS UGM).

pengaruh. Pandangan ini mulai dipertanyakan kembali oleh analisis-analisis terhadap pemilihan presiden 2014 dan pemilihan gubernur Jakarta terakhir pada 2017.

Pemilihan gubernur DKI Jakarta terakhir menjadi sorotan karena melibatkan juga politisasi isu penodaan agama yang juga meningkat di Indonesia. Crouch (2012) mencatat kasus penodaan agama meningkat drastis sejak 2002 dan sampai 2014 ada setidaknya 106 orang yang dihukum berdasarkan UU Penodaan Agama (Amnesty Internasional 2014). Para terhukum itu sebagian besar adalah bagian dari kelompok minoritas. Sebagaimana ditunjukkan Marshall dan Shea (2011), penerapan UU ini di berbagai negara sarat dengan represi dan manipulasi politik.

George (2016) menunjukkan bagaimana isu penodaan agama ini menjadi senjata para *entrepeneur* (“pengusaha”) politik dalam mengupayakan kepentingannya dan menyebut fenomena ini sebagai “pelintiran kebencian” (*hate spin*). Mereka mengobarkan kemarahan atas sesuatu yang dipersepsi sebagai penodaan agama untuk memobilisasi dukungan dan menyasar lawan. Mereka selama ini luput dari perhatian karena yang dianggap sebagai pemicu kekerasan adalah kelompok minoritas yang dianggap melakukan penistaan. Namun George kurang mengelaborasi lebih jauh mengapa para *entrepeneur* politik tersebut berhasil di satu tempat dan gagal di tempat lain.

Fenomena pelintiran kebencian yang digambarkan George nampak jelas dalam kasus perusakan dan pembakaran tempat ibadat warga Tionghoa di Tanjung Balai pada 29-30 Juli 2016. Sejak peristiwa ini pertama kali meletus, kami mengumpulkan berbagai laporan dan liputan dan terus mengikuti perkembangannya. Berbagai laporan umumnya menggambarkan peristiwa tersebut sebagai konflik etno-religius yang dipicu oleh ketersinggungan karena pernyataan Meliana, seorang warga Tionghoa yang dianggap menghina simbol agama. Meliana yang menjadi korban perusakan itu kini masih harus menghadapi ancaman lain setelah pada Maret 2017 lalu dia ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama.

Kasus tersebut bergulir menjadi kasus penodaan setelah para tersangka perusakan mendapatkan vonis hukuman. Pada saat itulah kami memutuskan untuk melakukan studi lapangan dan mengumpulkan keterangan secara langsung. Studi ini dilakukan pada 12-19 Maret 2017. Tim pertama mengumpulkan keterangan di Medan, mengingat kasus penodaan agama ini ditangani di tingkat Polda Sumatera Utara. Sementara tim kedua mengumpulkan keterangan di Tanjung Balai untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai konflik kekerasannya sendiri.

Kami mewawancarai anggota Polda Sumatera Utara, Polres Tanjung Balai, Polsek Tanjung Balai Selatan, Kesbangpol dan Pejabat Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai. Kami juga menemui warga dan kepala lingkungan di lokasi kejadian, pengurus partai politik, pemuka ormas kepemudaan, ormas keagamaan, dan pengurus tempat ibadat. Para pelaku perusakan maupun pihak-pihak yang muncul pasca-konflik juga kami wawancarai, terutama pengurus Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB) dan Forum Pembela Muslim Tanjung Balai.

Selain wawancara, kami juga mengikuti laporan media, menganalisis dokumen-

dokumen Berita Acara Pemeriksaan di pengadilan, dokumen gelar perkara, laporan-laporan lembaga pemantau, dokumen fatwa serta surat-menyurat lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kasus ini.

Laporan ini dibagi ke dalam lima bagian. Setelah menguraikan gambaran singkat mengenai latar belakang studi ini dan menjelaskan konteks Kota Tanjung Balai, laporan ini akan menuturkan proses yang berujung pada konflik kekerasan dan menggarisbawahi beberapa faktor yang dianggap memengaruhinya. Bagian berikutnya mengulas aspek pemolisian serta kontroversi seputar penodaan agama yang mengemuka setelah konflik dan terus bergulir hingga kini. Laporan ini kemudian ditutup dengan kesimpulan dan beberapa saran kebijakan.

II. DINAMIKA SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK DI TANJUNG BALAI

Tanjung Balai merupakan kota kecil di Provinsi Sumatera Utara namun padat penduduknya. Luas kota ini tidak lebih dari 61 Km dan jumlah penduduknya mencapai 167.012 jiwa pada 2015. Daerah ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara (kini sekitar 2.760 jiwa per km²), tetapi minim sekali ruang publik. Kota ini lebih hidup ketika malam hari. Di siang hari kota relatif lebih sepi, dan tempat makan atau warung kopi baru buka sore hari.

Kota ini merupakan salah satu pusat perkembangan etnis Tionghoa di wilayah Sumatera Utara. Ini karena penduduk Melayu di pesisir Pantai Timur termasuk Tanjung Balai telah menjalin kontak bisnis dengan pedagang komunitas China sejak abad ke-18 (Reid 2011). Kota Kerang ini pernah mengalami kerusuhan rasial anti-Tionghoa pada 1946 (Ricklefs 2008), 1966 (Salim dkk. 2009), dan 1998 (Glionna 2016).

Saat ini warga etnis Tionghoa berjumlah sekitar 9,33 persen dari total penduduk dan umumnya tinggal di daerah yang dilalui Sungai Asahan. Mayoritas penduduk beretnis Batak (42,56 persen), disusul Melayu (26,41), Jawa (17,06), lalu sisanya Aceh dan Minang. Warga Tionghoa umumnya menganut agama Buddha dan Khonghucu. Jumlah pemeluk Buddha di kota ini sekitar 7,7 persen. Sedangkan Khonghucu tidak lebih dari 0,45 persen. Penganut agama Islam adalah yang terbanyak (84,57 persen), disusul Kristen (5,3 persen), Katolik (1,77 persen), dan Hindu (0,18 persen). Warga setempat umumnya menggambarkan Muslim di kota ini sebagai Muslim “KTP” (Kartu Tanda Penduduk) atau Muslim nominal, tetapi mereka mudah naik pitam jika agama mereka dihina atau dipersoalkan.

Penduduk setempat umumnya tidak bisa membedakan mana Tionghoa yang beragama Buddha dan Khonghucu (Irwansyah 2013). “Tempat ibadat, balai pengobatan atau pun yayasan sosial yang bertuliskan huruf China dianggap milik Tionghoa penganut Buddha,” kata Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tanjung Balai. Padahal, tempat-tempat tersebut ada yang milik Buddha dan Khonghucu.² Warga non-Tionghoa juga ada

² Merujuk data resmi Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Balai terkait rumah ibadat pada 2017, ada 60 masjid, 101 musala, 42 gereja (Katolik dan Kristen), 11 Vihara, 12 Kelenteng, dan balai balai pengobatan di kota ini. Vihara dan kelenteng terkonsentrasi di Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Masing-masing ada sembilan di kecamatan ini (ditambah dengan satu balai pengobatan). Juga ada delapan masjid

yang memeluk Buddha meski jumlahnya tidak besar. Selain itu, keberadaan Tridharma³ di Tanjung Balai merupakan sisi lain dari partikularisme keagamaan dalam etnis Tionghoa.

Penduduk non-Tionghoa juga umumnya menganggap etnis Tionghoa sebagai pendatang. Seorang informan mengatakan, “China bukan pribumi. Melayu yang pribumi [warga asli Tanjung Balai]. Pendatang dari Jawa, Batak, di luar China, juga bukan pribumi. Tapi [mereka] harus dilindungi. Karena, mereka bukan China, bukan penjajah ekonomi.” Irwansyah (2013) juga menemukan bahwa kecemburuan Muslim terhadap penganut Buddha lebih kuat dibanding terhadap penganut Kristen, karena orang-orang Tionghoa menguasai segala bidang, terutama sektor ekonomi. Dari observasi kami, okupasi dan status sosial ekonomi penduduk Tionghoa di kota ini sebetulnya beragam. Mereka ada yang menjadi penarik becak dan anak buah kapal. Tetapi ungkapan di warga setempat begitu melekat bahwa, “Semiskin-miskinnya warga Tionghoa tidak semiskin warga pribumi.”

Penduduk non-Tionghoa yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) atau tidak merantau ke daerah lain banyak yang bekerja sebagai buruh di pertokoan atau kapal. Sebagian besar pertokoan di pusat Kota Tanjung Balai, yakni Kecamatan Tanjung Balai Selatan, adalah milik penduduk Etnis Tionghoa. Demikian juga dengan kapal-kapal nelayan di Sungai Asahan. “Pribumi” banyak yang menjadi anak buah kapal (ABK), para pengusaha Tionghoa yang mempunyai kapal-kapal besar (Irwansyah 2013). Dalam beberapa segi, warga Tionghoa sering dianggap tertutup (misalnya bangunan rumah, penggunaan bahasa di ruang publik, dll.), tetapi di segi lain, sebagai majikan, pedagang, pemilik kapal, mereka harus berinteraksi dan tidak bisa tertutup.

Salah satu ujung tombak ekonomi Tanjung Balai adalah pelabuhan Teluk Nibung.⁴ Pelabuhan ini tidak hanya menjadi titik penyeberangan orang menuju Port Klang Malaysia, tetapi juga menjadi pintu masuk barang-barang ekspor-impor seperti gula, bawang merah, barang elektronik, garmen, hingga mainan anak-anak. Barang-barang tersebut, khususnya pakaian bekas, dapat ditemukan di pasar khas Tanjung Balai, Monza. Pelabuhan Teluk Nibung dan Pasar Monza merupakan pusat rantai ekonomi penduduk Tanjung Balai, dari kuli panggul, buruh bongkar muat, pengusaha, hingga aparat keamanan dan petugas bea-cukai.

Namun, rantai ekonomi di atas mulai terputus ketika pemerintah melalui Kementerian

dan sepuluh musala di Kecamatan Tanjung Balai Selatan ini. Dua Vihara lainnya berada di Kecamatan Tanjung Balai Utara dan tiga kelenteng di Kecamatan Sei Tualang Raso. Di luar tiga kecamatan itu, tidak ada vihara dan kelenteng di Kecamatan Teluk Nibung, Datuk Bandar, dan Datuk Bandar Timur. Gereja paling banyak berada di Kecamatan Datuk Bandar, berjumlah 30. Ada sembilan gereja di Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Artinya, kecamatan ini, yang merupakan pusat insiden pembakaran tempat ibadat, adalah kecamatan yang paling heterogen ketimbang kecamatan-kecamatan lainnya. Warga non-Tionghoa mengidentifikasi kecamatan ini sebagai “Kota China”. Karena, selain banyak tempat-tempat ibadat milik penduduk keturunan Tionghoa, penghuni kecamatan ini banyak dari keturunan Tionghoa.

³ Terkait perbedaan dan perkembangan Tridharma, Konfusianisme, dan Buddhisme di Indonesia, lihat tulisan Leo Suryadinata, “State and Chinese Religions in Indonesia: Confucianism, Tridharma, and Buddhisme During the Suharto Rule and After” (2014: 19-43), dalam buku yang disunting Tan Chee-Beng (2014).

⁴ Kota Tanjung Balai sebetulnya terkurung di tengah Kabupaten Asahan dan tidak punya pantai, hanya sebagian wilayahnya dilalui Sungai Asahan dan terhubung ke laut.

Perdagangan mengeluarkan peraturan No. 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang perubahan Permendag No.44/MDag/PER/10/2008 tentang pembatasan impor barang terhadap lima produk, yakni elektronik, garmen, mainan anak-anak, alas kaki, serta makanan dan minuman. Peraturan ini juga menyebutkan hanya lima pelabuhan saja yang menjadi pintu utama barang-barang tersebut, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar. Sejak keluarnya peraturan tersebut aktivitas Pelabuhan Teluk Nibung menurun drastis (Iskandar Muda 2010).

“Banyak warga Melayu yang menganggur ketika peraturan itu diterapkan. Dulu mereka bisa jadi kuli bongkar-muat barang. Sekarang, warga sibuk main kartu untuk mengisi waktu senggang. Atau mereka narik becak motor [Betor] dengan penghasilan pas-pasan,” kata Bhabinkamtibmas salah satu desa di Tanjung Balai. Sementara kalangan lain yang lebih melek politik memilih untuk “bermain proyek pemerintah.” Di sana perpindahan pejabat pemerintah daerah saja bisa menjadi isu unjuk rasa. Hampir setiap hari ada unjuk rasa di pusat kota dengan nama organisasi berbeda tetapi orang-orangnya sama. Ormas keagamaan tidak terlalu berkembang di sana meski namanya banyak muncul di berbagai unjuk rasa. Mereka, misalnya, tidak pernah mendengar melakukan *sweeping* meski kota ini dikenal penuh dengan tempat perjudian dan hiburan malam.

Yang masih bertahan menjalankan bisnis ekspor-impor lama umumnya adalah pengusaha ilegal dan pejabat yang “nakal”. Barang-barang seperti bawang, pakaian bekas, hingga narkoba masih bisa masuk secara bebas ke Tanjung Balai. “Yang penting jangan sampai jumpa Angkatan Laut dari Surabaya. Mereka tidak bisa disuap,” kata salah satu pengurus partai yang mengaku pernah menyelundupkan minyak ke Malaysia. Informan lain menganggap, “Aparat keamanan tidak jarang menjadi *backing* pengusaha kotor, terutama dari etnis Tionghoa.”⁵

Partai politik yang dominan di kota ini adalah Golongan Karya (Golkar, tujuh kursi). Beberapa orang keturunan Tionghoa Tanjung Balai juga terlibat aktif dalam politik lokal pasca-Orde Baru. Mereka menjadi pengurus partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Gerindra, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Mustaqfirin dan Kodiran 2012). “Kebanyakan *sih* aktif dan milih PDI-P,” kata salah satu pengurus Majelis Khonghucu Tanjung Balai. Nama-nama anggota dewan di Tanjung Balai seperti Tan Hok Min dari PKPI (2004-2009) dan Hakim Tjoa Kien Lie dari PDI-P (2004-2009 dan 2009-2014) merupakan politisi keturunan Tionghoa. Bahkan, Hakim Tjoa Kien Lie pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Tanjung Balai berpasangan dengan Siti Maryani pada pilkada 2010-2015. Namun, pasangan yang diusung PDI-P ini kalah.⁶

Selain politik uang, Tanjung Balai amat rentan dengan politisasi agama. Pada Mei 2010, menjelang Pilkada Tanjung Balai, Gerakan Islam Bersatu meminta penurunan

⁵ Ada dua pengusaha keturunan Tionghoa di Tanjung Balai yang punya pengaruh besar dalam politik maupun ekonomi yang kerap menjalankan praktik kolusi, yaitu SS dan FW.

⁶ Kontestan Pilkada terakhir pada 2015 diikuti oleh pemain lama atau orang di sekelilingnya. Dari empat pasangan calon yang maju ada yang merupakan anak mantan walikota, petahana wakil walikota, mantan ketua dinas pendidikan, dan yang menang adalah anak pengusaha kaya dari jalur independen. Banyak informan menyebut kota ini seperti kerajaan karena keluarga pengusaha kaya itu menguasai jabatan-jabatan strategis di kota ini.

patung Buddha Amitaba di Vihara Tri Ratna di Jalan Asahan, Tanjung Balai. Patung setinggi enam meter itu telah diresmikan pada November 2009. Gerakan penolakan patung Buddha itu dikendalikan oleh salah satu anggota DPRD Tanjung Balai yang akan mencalonkan diri sebagai walikota (Irwansyah 2013).

Upaya penurunan patung tersebut ditolak oleh Wakil Walikota Tanjung Balai Thamrin Munthe yang juga mencalonkan diri sebagai walikota, dan menang, pada Pilkada 2010. Patung Buddha juga menjadi isu kampanye pada Pilkada 2015. Namun, patung Buddha tetap berdiri dan baru diturunkan 27 Oktober 2016 sesudah insiden pembakaran sejumlah vihara dan kelenteng di Tanjung Balai pada 29-30 Juli 2016. Insiden pembakaran tersebut bermula dari keluhan salah satu warga Tionghoa soal volume pengeras suara di Masjid depan rumahnya.

III. KELUHAN YANG BERBALIK MENJADI PETAKA

Meliana tidak menyangka perbincangannya saat belanja di warung Kasini (Kak Uo) menjadi masalah besar di Tanjung Balai. Dia mengeluh kepada Kak Uo pada Jumat, 22 Juli 2016, sekitar pukul 07.00 pagi, tentang volume pengeras suara Masjid Al-Maksum yang lokasinya persis di depan rumah yang dia sewa. Sudah delapan tahun dia menempati rumah yang berada di Jalan Karya, Kelurahan Tanjung Balai Selatan I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan itu.

Keluhan Meliana, yang merupakan keturunan Tionghoa dan beragama Buddha, dianggap tidak patut oleh pengurus masjid (DKM). Pihak DKM merasa Meliana keberatan dengan suara azan masjid. Bahkan DKM menganggap Meliana melarang azan. Meliana merasa tidak melarang azan. Dia hanya keberatan dengan volume suara azan yang dianggapnya terlalu kencang. “Kak Uo dulu *kan* suara masjid kita tidak begitu besar, sekarang *kok* agak besar,” kata Meliana kepada Kak Uo. “Iya, ya,” jawab Kak Uo. Perbincangan berhenti sampai di situ menurut kronologi Aliansi Sumut Bersatu (2017) berdasarkan wawancara dengan Meliana.

Lain cerita dengan pengakuan Kak Uo di persidangan.⁷ Meliana mengawali perbincangan dengan kata-kata, “Oh kak, bilang sama uwak itu, tolong kecilkan suara masjid, bising, kupingku ribut *kali*.” Kak Uo menjawabnya, “Ya nanti ku sampaikan sama ayahku [Kasidi, pengurus Masjid].” Kak Uo menyampaikan ke adiknya, Hermayanti, pada 23 Juli 2016: “Her, orang China [di] muka itu minta kecilkan volume masjid.”

Dua hari kemudian (25 Juli 2016) Hermayanti menyampaikan kepada Kasidi: “Pak, China itu datang ke kedai Kak Uo minta tolong supaya suara masjid dikecilkan, sakit telinganya mendengar. Berisik.” Kemudian Kasidi mendatangi Kak Uo untuk konfirmasi. Kak Uo menjawab: “Ya, ada pak, dia minta kecilkan suara masjid itu, pak, bising katanya.”

Pada 29 Juli 2016, pukul 16.00, Kasidi memberitahu Sahrir Tanjung, warga setempat: “Er [panggilan Sahrir], itu China yang di depan keberatan mendengar suara masjid ini, dimintanya dikurangi suaranya jangan keras-keras.” Er bertanya, “Dari mana dapat informasi itu?” Kasidi menjawab, “Dari anakku si Uo dibilangnya sama aku.” Er meminta

⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 459/Pid.B/2016/PN-Tjb.

Kasidi membicarakan masalah itu nanti.

Usai salat Magrib, Kasidi memberitahu Haris Tua Marpaung, Zul Sambas, dan Dailami selaku DKM masjid, dengan mengatakan, “Macam mana ini China yang di depan itu minta suara volume masjid dikecilkan?” Tidak lama sesudah mendengar cerita Kasidi (sebelum Isya) Haris Tua Marpaung (Lobe), Dailami, Zulfan Sambas, dan Rifai mendatangi rumah Meliana. Terjadi dialog antara perwakilan DKM dengan pihak Meliana.

Ada dua versi tentang isi dialog antara mereka, yakni versi Meliana dan Lobe. Pemberitaan media lokal dan nasional banyak yang menggunakan versi Lobe ketimbang versi Meliana. Berikut ini salinan dialog versi Meliana yang disusun Aliansi Sumut Bersatu berdasarkan pengakuan Meliana:

Lobe: “Kak kamu melarang azan ya?”

Meliana: “Saya tidak pernah melarang azan.”

Kasidi: “Pindahlah kamu dari sini, tidak usahlah kamu tinggal di sini.”

Menurut Aliansi Sumut Bersatu, suami Meliana (Lian Tui) dan Boy (Menantu Pak Kasidi), yang saat itu berada dekat pagar rumah Meliana, meminta Meliana untuk masuk ke rumah karena massa sudah banyak di luar. Saat itu juga Lian Tui pergi ke Masjid Al-Maksum untuk meminta maaf kepada para pengurus mesjid. Saat itu hadir Kasidi, Zailani, Haris Tua Marpaung, dan yang lainnya, sekitar 10 orang. Lian Tui kemudian pulang, sambil menyalami yang hadir di masjid itu.

Lobe, Dailami, dan Rifai membenarkan bahwa pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 19.15 setelah salat Maghrib di Masjid Al-Maksum, seorang jamaah Masjid bernama Bapak Kasidi (Nazir Masjid Al-Maksum) memberikan laporan kepada DKM bahwa Meliana merasa keberatan dengan suara azan. Setelah mendapat laporan tersebut, DKM Masjid bersepakat mengirim perwakilan untuk mendatangi rumah Meliana. Perwakilan tersebut adalah Haris Tua Marpaung (Lobe), Dailami, kemudian disusul Rifai, Zulfan Sambas, dan Kasidi.

Saat mendatangi rumah Meliana, pintu rumah dalam keadaan tertutup. Setelah pintu diketuk beberapa kali, pintu bagian dalam dibuka anak Meliana. Kemudian Haris Tua Marpaung atau Lobe langsung menanyakan dengan dialog sebagai berikut:⁸

Lobe: “Ada bapak atau mamak?”

⁸ Lihat Surat Pernyataan Atas Nama Haris Tua Marpaung, Dailami, dan Rifai, 2 Desember 2016. Bandingkan juga dengan video “Kesaksian Imam Masjid Atas Kerusakan Tanjung Balai,” <https://www.youtube.com/watch?v=YfTSCBNn79Q>. Lihat juga laporan investigasi Majalah Tempo, “Malam Mencekam di Tepi Asahan,” 14 Agustus 2016, yang menggunakan kesaksian Haris Tua Marpaung.

Anak Meliana: “Ada.”

Lobe: “Katanya di rumah ini ada keberatan suara azan di masjid?”

Anak Meliana: “Ya, *lho*, itu masjid bikin bising, tidak tenang, bikin ribut.”

Lobe: “*Lho*, itu *'kan* rumah ibadat, umat Islam mengumandangkan azan ada lima kali.”

Meliana: “*Lu ya, lu ya*, kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum. Itu masjid bikin telinga *gua pekak*, sakit kuping saya, hari-hari ribut, pagi-pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin *gua* tidak tenang.”

Lobe: “Jangan gitu *loh*, kami umat Islam kalau mau salat dipanggil melalui suara azan. Ada lima waktu sehari semalam. Lagi pula kami pun kalau kalian mau ibadat pakai bakar-bakar dupa, abunya beterbangan ke sana ke mari. Tambah dengan suara bunyi-bunyi, kami tidak keberatan.”

Menurut versi Lobe, “Kemudian kami pergi ke masjid. Lalu suami Meliana mendatangi kami dan mohon maaf.” Azan Isya pun berkumandang. Saat itu, “Meliana keluar dari rumahnya,” kata Lobe, dan [Meliana] berkata, “Itulah yang membikin kuping pekak!”

Pada pukul 19.15, Fahrur Razman Sambas, Kepala Lingkungan (Kepling) I Kelurahan Tanjung Balai Kota I, mengetahui masalah tersebut. Dia melaporkan kondisi yang terjadi melalui handphone kepada lurah. Lurah meminta Kepling I untuk mengundang Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM, dijabat Babhinkamtibmas dan Babinsa). Kepling bersama Babhinkamtibmas Brigadir Kuntoro pada pukul 20.30 mengundang Meliana dan DKMAI-Maksum ke kantor Kelurahan Tanjung Balai Kota I untuk membahas dan meminta keterangan dari kedua belah pihak. Meliana mengakui perbuatannya tentang keberatan atas volume pelantang suara masjid AI-Maksum yang terlalu keras.

Pada pertemuan itu, Pak Lurah menyarankan agar: (1) Meliana meminta maaf kepada DKM dan umat Islam; (2) Meliana tidak tinggal di rumahnya saat ini jika merasa terganggu karena berdekatan dengan masjid; (3) menjaga keselamatan keluarga Meliana dengan mengungsi ke tempat lain untuk sementara waktu.⁹

Tetapi sebelum terjadi kesepakatan tersebut di atas, sekitar pukul 21.15, massa telah berkumpul di luar kantor lurah. Keadaan tidak kondusif. Seorang tidak dikenal memasuki atau menerobos kantor Lurah bermaksud memukul Meliana dan suaminya namun dihadang pihak kelurahan dan “diamankan” pihak kepolisian. Karena itu, lurah dan pihak

⁹ Surat Walikota Tanjung Balai No. 300/14317/Pem-an Tanggal 3 Agustus 2016 Perihal Laporan Insiden Pembakaran dan Pengrusakan Saran dan Prasarana Etnis Tionghoa.

kelurahan meminta Meliana dan suaminya dibawa ke Polsek Tanjung Balai Selatan.¹⁰

Pada saat yang sama, menurut pengakuan terdakwa Aldo, warga Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, sekitar pukul 20.00, dia dihubungi temannya bernama Ibnu.¹¹ Ibnu mengatakan bahwa ada China mengamuk di kantor kelurahan. Aldo kemudian pergi ke kelurahan. Di tengah perjalanan, dia menghubungi Rudi Bakti dengan mengatakan, “Segera ke kantor lurah Jalan Juanda, ada China *ngamuk*.”

Sesampainya Aldo dan Rudi Bakti di kelurahan, Ibnu sedang marah dengan mengatakan, “*Masak* pula China larang-larang azan, ‘*kan* tidak cocok!” Aldo kemudian bertanya kepada seorang warga yang berada di kelurahan dan dijawab, “Ada China datang bercelana pendek ke musala Jalan Karya, pas azan berkumandang dia marah-marah menyuruh kecilkan suara, katanya terganggu dia istirahat, ini bukan sekali, sudah sering.” Lalu Aldo masuk ke kantor lurah dan mencari warga Tionghoa yang dimaksud, tetapi ketika itu Meliana sudah dibawa ke Polsek.

Aldo keluar dari kantor lurah menemui Ibnu dan Rudi dan mereka kemudian pergi bersama-sama ke Polsek (Kepolisian Sektor) Kota. Sesampainya di sana, Rudi berkata, “Ini tidak bisa dibiarkan.” Rudi emosi dan mengeluarkan suara keras dengan mengatakan, “*Masak* pula azan berkumandang dilarang, ‘*kan* *nggak* cocok.” Suara keras Rudi mengundang perhatian masyarakat. Rudi, Aldo, dan Ibnu memaksa masuk ke kantor Polsek namun dihalang-halangi petugas kepolisian.

Saat itu Meliana bersama suaminya berada di ruang Kanit Reskrim. Mereka berunding dengan Kanit Reskrim, Wakapolres, Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), Ketua FPI (Front Pembela Islam), dua pengurus Masjid Al-Maksum, dan Camat Tanjung Balai Selatan.

Aldo dkk. akhirnya meninggalkan Polsek dan bergerak ke Bundaran PLN (Perusahaan Listrik Negara) di Jalan Sudirman. Di tengah perjalanan, Rudi berkata kepada Aldo, “Aku pak, aksi ini. Ini tidak bisa lagi dibiarkan.” Aldo menjawab, “Tenang dulu, jangan gegabah.” Rudi merespon, “Ya, sudahlah, pak, kalau kau tidak turun aku tetap turun.” Setelah itu Aldo dan Rudi mengambil pengeras suara dan berkumpul di Bundaran PLN tempat mereka biasa melakukan orasi. Aldo meminta Ibnu untuk menunggu di Bundaran PLN.

Rudi menghidupkan sirine pengeras suara di bundaran PLN sehingga mengundang keramaian. Rudi berorasi, “Hari ini kita jangan dipijak kaum China, adanya pelarangan azan yang berkumandang di masjid,” secara berulang-ulang.

Selain melalui orasi di Bundaran PLN, mobilisasi massa dilakukan lewat panggilan telepon. Para penggerak itu juga menghubungi massa dari Asahan. Massa dari Asahan

¹⁰ Surat Walikota Tanjung Balai Nomor 300/14317/Pem-an Tanggal 3 Agustus 2016.

¹¹ Keterangan mengenai mobilisasi massa ini kami ambil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Resor Tanjung Balai Atas Nama Al Rivai Zuherisa Alias Aldo, 3 Agustus 2016. Kami juga sempat mewawancari Aldo bersama anggota AMMIB pada 14 Maret 2017. Tidak ada perbedaan antara kronologi di BAP dengan hasil wawancara.

berkumpul di beberapa titik perbatasan. Aldo menghubungi Budi dan Al-Mustaqim Marpaung untuk mengabarkan aksi di Bundaran PLN, karena “China melarang Azan.” Budi dan Al-Mustaqim tiba di Bundaran PLN dan turut berorasi bahwasanya ada “orang China melarang azan.”

Rudi menghubungi seseorang. Aldo bertanya, “Siapa yang bapak hubungi?” Rudi jawab, “Bang Meri. Dia sor [tertarik] kalau masalah begini.” Meri adalah sekretaris Al-Washliyah Kota Tanjung Balai. Aldo dan teman-teman sempat memukuli seorang warga keturunan Tionghoa di Bundaran PLN. Kejadian tersebut sempat dilerai warga.

Sekitar pukul 21.30, personil Kepolisian mulai diterjunkan mengamankan rumah Meliana. Mereka juga mengetahui ada orasi di Bundaran PLN. Sekitar pukul 22.00, Rudi dan Marpaung mengarahkan massa ke rumah Meliana. Sesampainya di rumah Meliana, Rudi berorasi berulang kali tentang “etnis China yang melakukan pelanggaran azan.” Massa menyahutinya dengan kata-kata “usir-usir!”

Budi merangsek ke rumah Meliana sambil memegang botol Aqua berisi bensin. Seorang polisi menghalangi Budi. Namun Budi menarik polisi itu sambil berkata, “Awat kau!” Massa juga ikut menarik petugas kepolisian itu. Budi melemparkan botol Aqua di halaman rumah Meliana. Dia menyalakan korek api, membakar bagian depan rumah Meliana. Penduduk setempat sempat melarang dan memadamkan api karena tetangga Meliana berjualan gas.

Massa akhirnya merusak pagar rumah Meliana, melempari rumah Meliana dengan batu. Meri menyemangati massa dengan berkata, “Ayo... Ayo... Ayo!” Selanjutnya Aldo berorasi, “Allahu Akbar... Allahu Akbar... Allahu Akbar! Ada orang China yang melakukan pelanggaran azan. Ini tidak bisa kita biarkan saudara-saudaraku. Mari kita menuju Vihara Jalan Juanda, bersama-sama minta penjelasan.” Meri menghampiri Rudi dengan bertanya, “Ke mana lagi ini?” Rudi menjawab, “Ke Vihara [Jalan] Juanda.” “Yalah biar kupanggil kawan-kawan Al-Washliyah,” kata Meri.

Rudi memegang kendali menuju Kelenteng Huat Cu Keng di Jalan Juanda yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah Meliana. Mereka juga sempat merusak beberapa rumah warga keturunan Tionghoa ketika menuju kelenteng. Sekitar pukul 23.00, massa tiba di sana. Mereka langsung merusak pagar kelenteng itu dan melemparinya dengan batu.

Tidak lama kemudian, Wakapolsek beserta beberapa personil kepolisian tiba di lokasi kelenteng. Sempat terjadi dorong-mendorong antara petugas kepolisian dengan massa. Situasi akhirnya bisa terkendali. Aldo kemudian berorasi:

Aldo: “Allahu akbar... Allahu akbar... Allahu akbar... Masyarakat Kota Tanjung Balai mayoritasnya Muslim. Namun jika adanya pelanggaran azan oleh orang China, ini tidak bisa kita biarkan, betul saudara-saudarku?”

Massa: “Betul!”

Aldo: “Hari ini kita datang *kemari* [Vihara Huat Cu Keng] untuk meminta penjelasan terhadap jamaah vihara yang mana kita sudah tahu bahwasanya adanya pelarangan azan yang dilakukan jamaah vihara. Kepada pihak Polres Tanjung Balai, kami meminta ketegasannya terhadap pelarang azan ini. Karena, diduga keras adanya penistaan agama. Allahu Akbar... Allahu akbar... Allahu akbar... Betul saudara-saudaraku?”

Massa: “Betul!”

Wakapolres: “Itu sudah dilakukan pengamanan dari kantor lurah ke polsek kota, dan sekarang sudah dibawa ke Polres Tanjung Balai. Saya menjamin jika ini benar, kami akan menindaknya dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.”

Aldo: “Walau begitu, kami akan tetap mengawasi kasus ini.”

Wakapolres: “Ya, ya, sudah bisa bubar ‘kan?’”

Aldo: “Allahu akbar... Allahu akbar... Allahu akbar... Kepada masyarakat Kota Tanjung Balai yang mayoritasnya Muslim, dihimbau kita kembali ke tempat peristirahatan kita, ke rumah kita masing-masing. Kasus ini tetap kita awasi. Mari kita bubar.”

Aldo, Rudi, Al-Mustaqim, dan Ibnu kembali ke Bundaran PLN. Mereka diperintahkan pulang oleh Kesbangpol, Intel Polres, dan Kodim. Sementara Aldo dan Rudi pulang ke rumah Rudi, Budi dan Meri memimpin massa ke tempat lain. Menurut Rudi, “Bang Meri tidak bisa menarik pasukan. Tetap ikut main.” Menurut Aldo, Meri sempat meminta massa untuk menuju Pasiran (lokasi Vihara Tri Ratna). Massa itu menyebar ke beberapa lokasi tempat ibadat. Mereka mulai merusak dan membakar. Menurut penjaga Vihara Tri Ratna, massa datang dalam dua gelombang. Massa pertama berjumlah sekitar 30 orang datang pada pukul 23.10 [Pantauan CCTV]. Massa berikutnya yang datang pada pukul 01.00 berjumlah ratusan.

Ketika massa mulai menyebar dan merusak tempat ibadat, Kepolisian Resor mengumpulkan Sekda, Kesbangpol, MUI, dan FKUB. Mendekati pukul 00.00, mereka turun ke lokasi dan berkeliling kota menggunakan mobil patroli polisi, mengimbau massa dengan pengeras suara. “Kaum Muslimin dan Muslimat mohon kembali ke rumah masing-masing, sudah cukup, mari kita jaga situasi kamtibmas,” kata ketua MUI dari dalam mobil patroli. Massa waktu itu tidak menggubris dan masih tampak berkerumun di beberapa sudut. Situasi mulai bisa dikendalikan ketika pasukan Brimob tiba pada pukul 02.30. Pada pukul 04.30, situasi terkendali.

Akibat kejadian ini sejumlah tempat ibadat, balai pengobatan, dan yayasan sosial

di Kecamatan Tanjung Balai Selatan rusak. Rerata tempat-tempat yang dirusak massa mengakibatkan kerugian tidak kurang dari ratusan juta. Di kelurahan tempat tinggal Meliana, Tanjung Balai Kota I, ada empat balai pengobatan dan satu kelenteng dirusak massa. Massa juga merusak dua vihara, dua kelenteng, dan satu yayasan sosial di Kelurahan Indra Sakti, selain merusak satu yayasan sosial di Kelurahan Karya, dua kelenteng, satu vihara, dan satu balai pengobatan di Kelurahan Perwira.

Massa gagal merusak Vihara Bhakti Maitreya yang berlokasi di depan Pangkalan TNI AL, Kelurahan Karya, karena personil Angkatan Laut berhasil menghalau massa. Vihara Ariya Satyani di Jalan Karya Kelurahan Indra Sakti, yang jaraknya tidak jauh dari kantor Satuan Kepolisian Perairan Tanjung Balai, selamat dari aksi massa karena petugas Kepolisian Perairan berhasil menghalangi mereka. Ini menunjukkan bahwa kesiapan aparat keamanan menjadi salah satu kunci pencegahan mobilisasi massa.

IV. TINDAKAN PEMOLISIAN

Pada saat kejadian, personil yang bersiaga di Polres Tanjung Balai sangat minim. Kapolres sedang mengikuti acara dinas di Parapat (163 Km dari Tanjung Balai) dan baru tiba di Tanjung Balai pada pukul 00.30 (30/07) dini hari. Sementara itu, personil Brimob Tanjung Balai sedang dikirim ke daerah Kabanjahe (213 Km atau 2,5 jam waktu tempuh kendaraan dari Tanjung Balai) untuk mengamankan rusuh sengketa lahan pada siang harinya (29/07). Brimob Tebing Tinggi pun menyusul dikirim untuk membantu ke Kabanjahe tapi di perjalanan akhirnya mereka dipanggil kembali ke Tanjung Balai (105 Km, sekitar 2 jam waktu tempuh kendaraan).

Pada saat aksi-aksi massa berlangsung, pengelolaan keamanan dipimpin Wakapolres. Perhatiannya terpecah antara memediasi para pihak dan memimpin personil. Ketika mediasi berlangsung di kantor lurah dan di Polsek, mobilisasi dan perusakan sudah mulai berlangsung. Polisi gagal mengantisipasi dan mencegah mobilisasi massa, terutama yang berlangsung terang-terangan di Bundaran PLN.

Entah meremehkan atau takut kepada Aldo dan teman-temannya, tidak ada tindakan pencegahan apa pun ketika mereka berorasi di Bundaran PLN. Aldo dan Rudi adalah aktivis yang biasa mengumpulkan massa untuk melakukan demonstrasi terkait banyak kasus lain dan punya jaringan ke politisi lokal. Mereka merupakan “wirausahawan” konflik (politik maupun sosial) di Tanjung Balai.¹² Polisi seharusnya bisa membubarkan mereka di Bundaran PLN karena orasi mereka dilakukan pada malam hari dan menghasut massa dengan sentimen SARA.

Tapi ada satu tindakan krusial yang dilakukan Kanit Reskrim Polsek pada malam kejadian. Dia mengikuti massa perusak dan diam-diam menciduk para penjahar, semuanya

¹² Dalam satu kesempatan wawancara dengan Aldo dan anggota AMMIB, mereka bercerita tentang demonstrasi-demonstrasi yang pernah mereka lakukan sebelum kejadian ini. Mereka juga bercerita mengenai cita-cita mereka menggunakan AMMIB sebagai wadah aktivisme mereka untuk mengawasi kasus-kasus korupsi, narkoba, dan keagamaan di Tanjung Balai. “Prinsip kita dalam bergerak di tengah-tengah. Kita tidak akan memusuhi semua kelompok. Karena kita juga butuh buka puasa, ibarat orang puasa,” kata seorang aktifis AMMIB yang juga pengurus partai di salah satu kecamatan di Kota Tanjung Balai.

ada sembilan orang. Inilah yang kemudian memungkinkan proses penyidikan dan penangkapan 20 tersangka berikutnya bisa dilakukan dengan cepat. Jika tidak demikian, penangkapan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan tidak ada satu pun pelaku perusakan yang ditangkap.

Sehari sesudah peristiwa kekerasan terjadi, pemulihan situasi keamanan dilakukan oleh sejumlah pihak dengan menggelar deklarasi damai dan pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Kapolri menemui sejumlah tokoh di Medan dan memerintahkan Kapolda Sumut untuk langsung memimpin pemulihan keamanan. Pengerahan pasukan dilakukan di beberapa titik dan bekas-bekas kerusakan pun dibersihkan.

Penangkapan dilakukan oleh tim yang dipimpin Polda Sumatera Utara. Polisi juga membentuk unit kejahatan siber (*cyber crime*) untuk melacak penyebaran kebencian di media sosial. Semua barang bukti, foto dan rekaman CCTV dikumpulkan, lalu diperlihatkan bersama para anggota dan sembilan tersangka yang dicituk sebelumnya. Seorang narasumber di Polres menuturkan, “Jika terus diikuti, ada ratusan tersangka yang bisa ditangkap. Tetapi [itu] tidak kita kembangkan.” Ketika itu pimpinan memutuskan cukup 22 orang yang ditangkap. Tetapi mereka mengaku masih memegang barang bukti, sehingga jika ada yang masih “macam-macam”, mereka bisa “dipetik” lagi. Tidak ada pertimbangan khusus dalam memilih 20 di antara ratusan itu, hanya yang mudah diidentifikasi saja. Saat penangkapan, anggota Polda Sumut (Kapolda, Wakapolda, Direskrimsus, BKO, Serse) bergiliran berkantor di Polres Tanjung Balai.

Ketika itu ada protes untuk menanggukkan penahanan, sehingga beberapa tersangka berubah status menjadi wajib lapor. Begitu berkas sudah P21, tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada jaksa dan mereka masuk tahanan. Protes pun muncul kembali dari pihak keluarga, beberapa lembaga seperti AMMIB, FPU, dan lainnya. Mereka menuntut agar tersangka bisa dilepaskan sebagaimana ketika ditahan di Polres. Saat itu sempat muncul juga isu anti-Islam karena Kapolres beragama Islam sedangkan Kejari dan Ketua Pengadilan beragama Kristen. Akhirnya para tersangka tidak sampai menginap dan keluar pada pukul 10 malam.

Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai akhirnya memutus ringan delapan terdakwa perusakan vihara, pencurian dan provokator, dengan masa hukuman antara satu hingga empat bulan penjara. Tokoh masyarakat dan tokoh agama yang kami temui di Tanjung Balai umumnya berharap kasus ini disudahi dan tidak diperpanjang lagi. Tetapi beberapa pihak, terutama AMMIB, yang dibentuk untuk membantu para tersangka perusakan, gencar menuntut agar Meliana juga dipidanakan dengan tuduhan penodaan agama.

V. PERKEMBANGAN KASUS PENODAAN AGAMA

Perjalanan kasus penodaan agama yang dituduhkan kepada Meliana cukup menarik karena sebenarnya tidak ada masyarakat yang mau menjadi pelapor. Karena itu, kepolisian meminta Kuntoro (Bhabinkamtibmas setempat) untuk membuat laporan penodaan agama oleh Meliana. Ini membuat Kuntoro sangat tertekan, apalagi dia pernah punya trauma karena anak istrinya menjadi korban bencana tsunami Aceh.

MUI Kota Tanjung Balai juga menolak mengeluarkan fatwa mengenai Meliana. Tetapi lembaga-lembaga seperti FUI, HTI, dan al-Wasliyah serta AMMIB terus mendesak. AMMIB bahkan sampai menggelar aksi dan menyegel kantor MUI Tanjung Balai pada Desember 2016. Akhirnya pada Januari 2017 MUI Sumut mengeluarkan fatwa nomor 001/KF/MUI-SU/I/2017 bahwa yang dilakukan Meliana adalah penistaan terhadap agama Islam. Meliana dianggap memaknai masjid sebagai tempat bikin ribut.

Ardiansyah, Sekertaris Umum MUI Sumatra Utara, mengamini penuntutan Meliana atas dasar penodaan agama. Dia beralasan, “Empat belas orang mujahid sudah diproses hukum dan kami ikhlas, tetapi kenapa biang persoalan (Meliana) tidak dihukum?” Hiruk-pikuk ini berlangsung bersamaan dengan aksi-aksi anti-Ahok di Jakarta. Malah, Ketua FPI, Riziek Sihab, sempat hadir dalam “Konsolidasi Nasional Spirit 212 Menyongsong Kebangkitan Islam” pada 28 Desember 2016 di halaman Masjid Raya Medan. Acara ini diselenggarakan GNPf MUI dan Gerakan Anti Penista Agama Islam (GAPAI) Sumatra Utara.

Kemungkinan besar faktor-faktor itulah yang mendorong polisi memilih untuk meneruskan kasus Meliana, selain karena desakan beberapa lembaga-lembaga setempat. Alih-alih menyiapkan pasukan untuk mengantisipasi protes lanjutan, polisi memilih jalan mudah dengan mengikuti tuntutan beberapa kalangan pemrotas. Polisi sebetulnya agak kesulitan membangun kasusnya karena tiga saksi kunci – Haris Tua Marpaung (imam masjid), Dailami (anggota jemaah masjid), dan Rifai (kepala lingkungan) – menyampaikan keterangan yang berbeda-beda ketika menjelaskan peristiwa. Tetapi yang mengherankan, polisi masih terus melanjutkan kasus ini.

Proses gelar perkara kasus Meliana dilakukan di Polda Medan. Setelah berkali-kali gelar perkara, polisi akhirnya menyatakan Meliana sebagai tersangka pada Maret 2017. Dia dijerat dengan tindak pidana penistaan agama (pasal 156 subsider 156a KUH Pidana). Ketua Front Pembela Islam Tanjung Balai, Osama, sebagaimana dilaporkan *Waspada* (29 Maret 2017) menyatakan, “Meliana harus dijebloskan ke penjara karena telah memicu konflik SARA, mengakibatkan kerugian moril dan materil.” Dia meminta umat Islam mengawal kasus ini, “Jangan sampai kejadian seperti di Jakarta, tersangka [Ahok] bebas melenggang.”

Ini jelas merupakan pelintiran karena yang memiliki andil lebih besar dalam mengobarkan kemarahan dan kekerasan adalah mereka sendiri. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus serupa, di sini pasal penodaan agama menjadi senjata pihak yang dominan untuk semakin membungkam kelompok minoritas yang bahkan sudah tertindas. Kasus ini menjadi peringatan serius untuk meninjau kembali relevansi UU penodaan agama yang lebih sering menjadi alat berkonflik dan bukan malah mencegah konflik.

VI. SIMPULAN DAN CATATAN

Kami menemukan ada yang luput dari sebagian besar laporan yang menggambarkan peristiwa perusakan di atas sebagai aksi spontan akibat miskomunikasi. Meski mungkin memang tidak dirancang dari jauh-jauh hari, tetapi jelas ada mobilisasi dan karenanya tidak spontan. Keluhan wajar antar-tetangga direkayasa sedemikian rupa sehingga

mengobarkan kemarahan seisi kota.

Mobilisasi dan rekayasa ketersinggungan itu efektif karena beberapa faktor, antara lain tidak adanya saluran komunikasi yang setara di antara kelompok etnis dan agama, konflik-konflik sebelumnya yang belum terselesaikan, kecemasan ekonomi, dan kekecewaan politik. Kisruh politik dan protes anti-Ahok di Jakarta juga turut berperan membuat konflik ini berlarut, dan juga sebaliknya, digunakan untuk meningkatkan tekanan kepada Jakarta.

Konflik yang bereskalasi dengan sangat cepat dalam hitungan jam pada 29-30 Juli 2016 tidak hanya menimbulkan dampak kerusakan bangunan, tetapi juga memunculkan para pihak baru dalam konflik (*conflict-generated parties*). Mereka menuntut polisi dan pemerintah kota untuk membebaskan para tersangka dan mendesak agar Meliana dipenjara.

Kasus ini menunjukkan bahwa undang-undang penodaan agama justru menjadi alat berkonflik, bukan menjadi pencegah konflik sebagaimana anggapan pemerintah. Tidak pernah ada momen paling penting selain saat ini untuk meninjau kembali kegunaan UU ini. Jika UU ini tidak mungkin dihapuskan, maka harus ada cara agar UU itu bisa “dimatikan” atau “tidak lagi digunakan.”

Sebagian besar liputan media massa yang kami himpun lebih banyak menyudutkan Meliana sebagai pemicu kerusuhan. Padahal dia sendiri tidak menghendaki demikian karena rumah dan tempat ibadat etnisnya sendiri menjadi korban perusakan. Media mesti lebih jeli dan menunjukkan aktor penggerak utama dan perekayasa kebencian.

Catatan ini juga berlaku terutama bagi aparat kepolisian. Polisi di Tanjung Balai sebenarnya punya sumberdaya yang cukup untuk mengantisipasi kekerasan. Tetapi langkah pencegahan juga penting. Berdayakan bhabinkamtibmas yang paling dekat dengan masyarakat.

Terakhir, bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebijakan memperketat perbatasan dan ekspor-impor mesti disertai dengan membangun sektor ekonomi masyarakat yang lain. Yang tidak kalah penting, pemerintah juga perlu membangun saluran komunikasi yang setara dan pusat-pusat perjumpaan yang dapat mempertemukan berbagai kelompok yang berbeda.

Jakarta, Juni 2017

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Amnesty International. 2014. *Prosecuting Beliefs: Indonesia's Blasphemy Laws*. London: Amnesty International Ltd.
- Aspinall, Edward, Sebastian Dettman dan Eve Warburton. 2011. "When Religion Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study from Indonesia." *South East Asia Research*, 19 (1): 27-58.
- Chee-Beng, Ten (ed.). 2014. *After Migration and Religious Affiliation: Religions, Chinese Identities, and Transnational Networks*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Crouch, Melissa. 2012. "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law." *Asian Journal of Comparative Law*, 7 (1): 1-46.
- George, Cherian, 2016. *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hosen, Nadirsyah. 2016. "Race and Religion in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election." Dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (eds.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*, hal.180-193. New York: Routledge.
- Irwansyah. 2013. "Potensi Keretakan Hubungan Sosial Muslim-Buddhis (Kasus Konflik Patung Buddha di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara)." *Jurnal Analisa*, 20 (2): 155-168.
- Majalah Tempo. 2016. "Malam Mencekam di Tepi Asahan". *Tempo*, 14 Agustus.
- Marshall, Paul dan Nina Shea. 2011. *Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide*. Oxford: Oxford University Press.
- Muda, Iskandar. 2010. "Kontribusi Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Balai." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9 (1): 17-28.
- Mustaqfirin dan Qodiran. 2012. "Asimilasi Etnis Tionghoa Indonesia dan Impilkasinya Terhadap Integrasi Nasional (Studi di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara)." *Jurnal Ketahanan Nasional*, 17 (1): 19-30.
- Panggabean, Samsu Rizal. 2015. *Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia: Menjelaskan Variasi*. Disertasi Program S3 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Benjamin Smith. 2011. "Explaining Anti-Chinese Riots in Late 20th Century Indonesia." *World Development*, 39 (2): 231-242.
- Purdey, Jemma. 2006. *Anti-Chinese Violence in Indonesia: 1996-1999*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Terj. Tim Penerjemah Serambi. Revisi kedua. Jakarta: Serambi.
- Reid, Anthony. 2011. *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Terj. Masri Maris. Jakarta: Pustaka Obor.
- Salim, Christina, dkk. 2009. "Kristalisasi Persepsi Terhadap Pribumi pada Perempuan Tradisional Tionghoa: Sebuah *Life History*." *Anima, Indonesian Psychological Journal*, 24 (2): 142-161.

B. Dokumen dan Sumber Internet

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Resort Tanjung Balai Atas Nama Al Rivai Zuherisa Alias Aldo, 3 Agustus 2016.
- Glionna, John. M. 2016. "In Indonesia, 1998 violence against ethnic Chinese remains unaddressed." *Los Angeles Times*, 4 July 2010, <https://defence.pk/pdf/threads/in-indonesia-1998-violence-against-ethnic-chinese-remains-unaddressed.443630/> (diakses 2 Maret 2017).
- Laporan penyampaian Jukrah Hasil Gelar Perkara Nomor B/242/11/2017/Ditreskrimun Kepolisian Negara RI Daerah Sumara Utara, 21 Februari 2017.
- Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB), Desember 2016.
- Putusan Pengadilan Nomor 459/Pid.B/2016/PN-Tjb.
- Surat MUI Sumatra Utara yang dikeluarkan Komisi Fatwa No 001/KF/MUI-SU/I/2017 tentang Penistaan Agama Islam oleh Meliana di Kota Tanjung Balai.
- Surat Panggilan No: S.Pgl/41/11/2017/Reskrim pada Peri Salim (16 tahun) anak Meliana, 4 Februari 2017.
- Surat Walikota Tanjung Balai Nomor 300/14317/Pem-an Tanggal 3 Agustus 2016 Perihal Laporan Insiden Pembakaran dan Pengrusakan Saran dan Prasarana Etnis Tionghoa.
- Surat Undangan Gelar Perkara No:B/386/11/2017 pada Meliana 14 Februari 2017.
- Surat Panggilan No:S.pg/85/III/2017/Reskrim 21 Maret 2017 diperiksa sebagai TERSANGKA atas 156 dan 156a KUHP sesuai laporan an. Kuntoro.
- Surat Laporan Kunjungan ke Tanjung Balai FKUB Sumut, 1 Agustus 2016.
- Surat Laporan FKUB Sumatra Utara Mengikuti Rakor di Kemenkopolhukkam Jakarta, 23 September 2016.
- Surat laporan Peristiwa Konflik Kerukunan Umat Beragama di Tanjung Balai oleh FKUB Sumut, 4 Oktober 2016.
- Video "Kesaksian Imam Masjid Atas Kerusakan Tanjung Balai," <https://www.youtube.com/watch?v=YfTSCBNn79Q> (diakses 2 Maret 2017).